

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR
7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN
TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINJAI**

SKRIPSI

OLEH :

DHIMAS PRAYUDA

NPM : 2003100014

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2024

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :

Nama : DHIMAS PRAYUDA
NPM : 2003100014
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik Hari,
Tanggal : Jumat, 18 Oktober 2024
Waktu : 08:15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)
PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si (.....)
PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

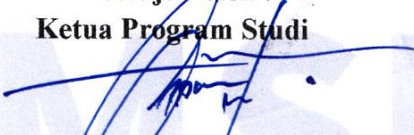
Nama : **DHIMAS PRAYUDA**
NPM : 2003100014
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai

Medan, 26 Oktober 2024

Pembimbing


DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si
NIDN . 0110097201

Disetujui oleh :
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN . 0122018801

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Dhimas Prayuda**, NPM 2003100014, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 12 Juni 2024



Yang Menyatakan,

Dhimas Prayuda

ABSTRAK
**Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Binjai Dalam Rangka
Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan
Sampah Di Kota Binjai**

Dhimas Prayuda
2003100014

Unit pelaksanaan teknis daerah pengelolaan sampah merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pengelolaan sampah. Dinas lingkungan hidup kota Binjai dalam mengimplementasikan peraturan walikota dan kebijakan dalam tugas pengelolaan sampah tingkat di kota binjai. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang baik merupakan tujuan dari penerapan undang-undang nomor 7 tahun 2018 pasal 2(c) tentang Unit pelaksanaan teknis daerah di kota binjai, disebutkan bahwa “ melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal membuang sampah serta pemanfaatan sampah. Maka dari itu Agar mengetahui kendala yang di hadapi oleh pemerintah kota khususnya kota dinas lingkungan hidup dalam menjalankan wewenangnya dan peraturan walikota yang telah di terapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deksriptif dengan analisis kualitatif serta analisis data yang digunakan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi strategi, program dalam sisitem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin di capai dalam implementasi kebijakan. Adapun teori yang saya gunakan yaitu teori tachjan (2006) yang dimana dari segi tingkat keberhasilan suatu implementasi yaitu adanya tindakan, adanya unsur pelaksana, adanya program yang di laksanakan, target group atau kelompok sasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan peraturan walikota binjai dalam rangka memaksimalkan tugas unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pengelolaan sampah di kota binjai belum terimplementasi, Hal ini dapat di buktikan dari program yang telah ditetapkan oleh dinas lingkungan hidup yaitu peraturan walikota kota binjai tentang tugas pokok dan fungsi Uptd dalam pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik. masih adanya sampah bertebaran di tepi jalan kota, kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan program Uptd, kurangnya komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Tugas Fungsi Dan Pokok.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Serangkai kata terimakasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu ayah dan ibu saya Bambang Efri Prayudi dan Hamidah yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : “Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Pengelolaan Sampah Di

Kota Binjai". Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Kepada orang tua yang saya banggakan dan sayangi yaitu ayah dan ibu saya Bambang Efri Prayudi dan Hamidah yang selalu mensupport dan mendoakan saya
2. Bapak Prof. Dr Agus sani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Arifin Saleh, S.Sos., MSP Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dedi Amrizal,S.Sos,M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
7. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
8. Kepada seseorang yang sangat spesial yang tidak dapat penulis sebutkan namanya maupun penulis deskripsikan bagaimana orangnya. Akan tetapi dia telah membantu, menemani dan bahkan selalu memberikan support penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai tepat pada waktunya sehingga

bisa mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik.

9. Kepada seluruh teman – teman saya Kepada sahabat penulis Srirahayu Ningsih, Nabila Salsabila, Karmila, Hendra Siregar, Dhimas Prayuda, Fathi Fauzi, Iwan Zinger, Harry Yuprawidana, Muhammad Nanda Syah dan juga para teman lainnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kash sebanyak- banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 22 agustus 2024

Penulis

Dhimas Prayuda

2003100014

DAFTAR ISI

PERYATAAN	i
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan masalah	
1.4 Manfaat penelitian	
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Implementasi	6
2.1.1 Pengertian Implementasi	6
2.1.2 Implementasi Kebijakan	9
2.1.3 Pengertian implementasi kebijakan publik	
2.1.4 Faktor Faktor Implementasi kebijakan	
2.1.5 Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan	10
2.2 Kebijakan	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan	12
2.2.2 Pengertian kebijakan publik	13
2.2.3 Faktor-Faktor kebijakan publik	15
2.3 Defnisi UPTD	15
2.3.1 UPTD	15
2.3.2 Tugas dan Fungsi UPTD	16
2.4 Pengelolaan	16
2.4.1 Definisi pengelolaan	16
2.4.2 Ciri-Ciri dan manfaat pengelolaan	17
2.5 Pengawasan	18
2.5.1 Defenisi pengelolaan	18
2.5.2 Ciri-ciri Pengawasan	18
2.6 Sampah	19

2.6.1 Defenisi Sampah	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Kerangka Konsep	21
3.3 Defnisi Konsep	22
3.4 Kategorisasi penelitian.....	
3.5 Informan	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	31
3.10 Struktur organisasi Dinas lingkungan hidup kota Binjai.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil penelitian.....	33
4.4.1Deskripsi Hasil Wawancara	34
4.2 pembahasan	45
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	:	Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	:	SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	:	Surat Permohonan Pengantian Judul Skripsi
Lampiran V	:	SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VI	:	SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	:	SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VIII	:	Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran IX	:	Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
Lampiran X	:	SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XI	:	SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XII	:	Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Binjai merupakan daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Namun tidak terlepas dari sampah. Sampah ialah salah satu masalah pokok yang muncul akibat dari adanya aktivitas manusia. Semakin bertambahnya populasi manusia yang menyebabkan peningkatan aktivitas manusia yang juga meningkatkan sisa dari hasil aktivitas manusia itu sendiri. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang dipandang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi negatif karena memerlukan biaya pengelolaan yang cukup besar. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang baik merupakan tujuan dari penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa kegiatan pengelolaan sampah terbagi menjadi dua kegiatan yaitu, pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yakni kegiatan pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah ialah kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Unit Pengelola Sampah Terpadu merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengolahan sampah terpadu. Unit Pengelola Sampah Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang

dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah yang tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPTD maupun dalam hubungan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. Peranan daerah dalam mensukseskan kebijakan pemerintah dalam Pengelolaan sampah dilanjutkan oleh daerah dengan mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang disesuaikan dan diatur dalam pemerintah daerah di setiap kabupaten\kota seperti yang ada pada Peraturan Walikota binjai nomor 7 tahun 2018 Tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pengelolaan sampah dan tempat pemrosesan akhir pada dinas lingkungan hidup kota binjai.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pasal 5 ayat 2C, bahwa Kepala UPTD Pengolahan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha dalam hal pembuangan sampah serta pemanfaatan sampah. Tetapi pada sisi lainnya, belum optimalnya kapasitas pengelolaan sampah yang dilakukan baik oleh masyarakat mau pun pemerintah daerah, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah contohnya mereka membuang

sampah di pinggir – pinggir jalan yang mengganggu pengendara lain yang lewat di jalan tersebut. Bahkan membuat TPS ilegal di lahan kosong, adanya dampak lingkungan yang diakibatkan masyarakat yang belum tertib dalam membuang sampah ialah menimbulkan bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan, kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Usaha pemerintah kota binjai khususnya dalam bidang lingkungan hidup yang salah satunya diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ditujukan pada staf atau jajaran di Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) di pengelolaan sampah. Tidak lain tujuan untuk mengoptimalisasikan sistem koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ke setiap pelaksana kebijakan pengelolaan sampah. UPTD dibentuk oleh pemerintah daerah dan berada di bawah naungan dinas lingkungan hidup, seperti Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait untuk mencapai target pembangunan daerah. UPTD bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada dinas terkait dan pemerintah daerah. Laporan ini mencakup pencapaian, kendala, dan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan struktur yang terorganisir dan fungsi yang jelas, UPTD berperan penting dalam memastikan pelaksanaan program-program pemerintah daerah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi Pada kenyataannya pada Peraturan Walikota binjai nomor 7 tahun 2018 Tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pengelolaan sampah dan tempat pemrosesan akhir pada dinas lingkungan hidup kota binjai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Di kota Binjai.

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Di kota Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

1. Kepada Kepala UPTD, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan Implementasi Memaksimalkan Tugas UPTD dalam Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas UPTD pengolahan sampah dikota

binjai, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Kepada Warga binjai, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Implementasi Memaksimalkan Tugas UPTD Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran warga binjai tentang pentingnya menaati suatu larangan yang telah ditetapkan pemerintah sesuai peraturan wali kota nomor 7 tahun 2018.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kebijakan publik dan lingkungan masyarakat.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Grindle (1980:7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi merupakan kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, yang dimana maksudnya adalah menurunkan atau menafsirkan alternative-alternatif yang mash abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit dan mikro.”

Menurut Mazmanian (2007:49), Menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilanlainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingindiatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan –

tindakan individu atau pejabat pemerintahan atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Upaya dan tindakan tersebut harus bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kebijakan umum berisi tindakan administrasi yang telah ditetapkan publik tetapi bersangkutan dengan mekanisme-mekanisme politik yang pada umumnya memiliki tujuan dalam meneliti pada program atau sasaran yang lebih tersusun agar penelitian mencapai pokok sasaran, sehingga memiliki hasil yang sesuai pada pokok-pokok permasalahan kebijakan itu sendiri.

2.1.2 Implementasi kebijakan

Dalam mengkaji suatu kebijakan terdapat aspek yang penting, yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan Udoji (1981:32) yang dikutip oleh Wahab dengan tegas mengatakan bahwa: *“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file*

jackets unless they are implemented.” (“pelaksanaan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Seperti halnya pengertian kebijakan, maka terdapat banyak sekali pengertian tentang implementasi kebijakan yang dipaparkan oleh para ahli sesuai sudut pandang masing-masing. Adapun pengertian Implementasi kebijakan menurut Wahab (2008:65) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai berikut: “Suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Seiring dengan definisi di atas, Wahab (2008:65) juga membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya,

maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu-individu atau kelompok swasta dengan mengerahkan seluruh sumber-sumber yang ada (dana, SDM, kemampuan organisasional) setelah suatu program ditetapkan, dimana tindakan ini diarahkan untuk mencapai hasil-hasil atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai.

2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan publik dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Menurut Hamdi (2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”.

Menurut Harsono (2002:27) Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tertentu yang berguna untuk menyempurnakan suatu program.

Waluyo (2007:50), implementasi kebijakan publik merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah,

masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi kebijakan publik menurut Wahab (2008:65), mengatakan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2.1.4 Faktor – faktor implementasi kebijakan

Adapun Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Menurut teori Edward III (dalam Agustino,

2006:149) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1)komunikasi; (2)sumber daya; (3)disposisi; (4)struktur birokrasi; faktor ini yang mempengaruhi implementasi kebijakan . Dapat juga dikatakan bahwa panduan atas kerja dinas lingkungan hidup adalah konvensi/kesepakatan bersama, Agar tidak terjadi pemecahan koordinasi pelaksanaan kebijakan ataupun pemecahan penanggung jawab.

2.1.5 Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan

Adapun suatu komponen yang telah di ungkapkan dalam teori Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak yaitu :

a. Adanya unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

b. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu.

c. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

d. Faktor lingkungan yaitu fisik, sosial, budaya dan politik

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme yang ada di dalamnya. Antar makhluk hidup saling berinteraksi dan menggantungkan agar siklus hidup dalam lingkungan dapat terus berjalan .

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Pendapat Wahab, (2004:3) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijakan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan menurut pendapat Wahab, (2004:3) bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik.

2.2.2 Pengertian kebijakan publik

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi. Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, antara lain: menurut Dye Dwiyanto Indiahono (2009:17) kebijakan publik adalah *Whatever government choose to do or not to do*. Maknanya bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan tersebut mempunyai makna dua hal penting yaitu: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pasolong (2008:16) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Peran penting dari kebijakan publik adalah untuk membuat masyarakat menjalani kehidupan yang lebih baik dengan cara menyediakan pelayanan publik untuk menjaga pemerataan distribusi barang dan jasa secara signifikan. Hal tersebut dianggap sebagai mekanisme untuk membangun sosial-ekonomi dan prosedur untuk menentukan masa depan pemerintahan suatu sosial.

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.2.3 Faktor-Faktor kebijakan publik

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Suharno (2010:53). Yaitu (1)Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar; (2)Adanya pengaruh kebiasaan lama; (3)Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi; (4)Adanya pengaruh dari kelompok luar; (5)Adanya pengaruh keadaan masa lalu; Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan.

2.3 Defnisi UPTD

2.3.1 UPTD

UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan di daerah tertentu. UPTD merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti mendidik, mengurus, dan memperbaiki sarana dan prasarana publik. UPTD biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kondisi di setiap daerah. Sebagai contoh, di daerah perkotaan biasanya dibentuk UPTD yang menangani masalah kebersihan dan pengelolaan sampah.

UPTD bekerja berdasarkan sistem hierarki, di mana UPTD terdiri dari beberapa unit kerja yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD. Setiap unit kerja memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, dan setiap unit kerja juga memiliki staf yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. UPTD juga bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti dinas-dinas terkait dan pemerintah kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh UPTD sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

2.3.2 Tugas dan Fungsi UPTD

UPTD memiliki beberapatugas dan fungsi penting diantaranya ialah :

- a. Menyelenggarakan pelayanan publik
- b. Menyediakan sarana dan prasarana publik
- c. Mendidik dan melatih masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik.

2.4 Pengelolaan

2.4.1 Definisi pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan

kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut GR Terry, pengertian pengelolaan adalah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sementara itu Toner mengartikan pengelolaan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. dari beberapa pengertian di atas tentu bisa disimpulkan tujuan pengelolaan adalah untuk mendapatkan sesuatu dengan nilai yang lebih baik dengan cara mengerahkan usaha-usaha.

2.4.2 Ciri-Ciri dan manfaat pengelolaan

Pengelolaan merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

2.5 Pengawasan

2.5.1 Defenisi pengelolaan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan maka diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

2.5.2 Ciri-ciri Pengawasan

Pengawas yang melakukan tindakan pengawasan secara preventif memiliki tujuan tertentu yaitu mencegah adanya suatu kegiatan yang termasuk menyimpang dari acuan. Biasanya kegiatan pengawasan preventif ini dilakukan oleh pengawas yang bertugas sebelum melakukan kegiatan yang dimaksud. Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan

untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintahan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.6 Sampah

2.6.1 Defenisi Sampah

Pengertian sampah pada umumnya merupakan sisa atau hasil dari kegiatan manusia sehari-hari yang tidak lagi bisa dimanfaatkan. Dapat ditemui di berbagai tempat dengan jenis dan wujud yang berbeda-beda. Sampah organik dan anorganik adalah 2 jenis sampah yang sering dibahas pada umumnya. Lalu berdasarkan UU nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, dan bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Menurut World Health Organization atau WHO selaku badan kesehatan dunia, sampah adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan sudah tidak digunakan lagi dalam artian tidak disenangi, tidak dipakai, ataupun memang ingin dibuang. Sederhananya, benda yang tidak disenangi dan dibuang ke alam adalah sampah. Seperti telah disebutkan, bahwa sampah bisa berwujud padat, cair, hingga gas. Sampah juga bisa berasal dari limbah rumah tangga, hasil industri, rumah sakit, pertanian, peternakan, pasar, perkebunan, dan berbagai tempat lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta dan dan digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Sedangkan menurut Nazir (2003: 52) menjelaskan metode deskriptif adalah adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Saryono (2010:3), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan

penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

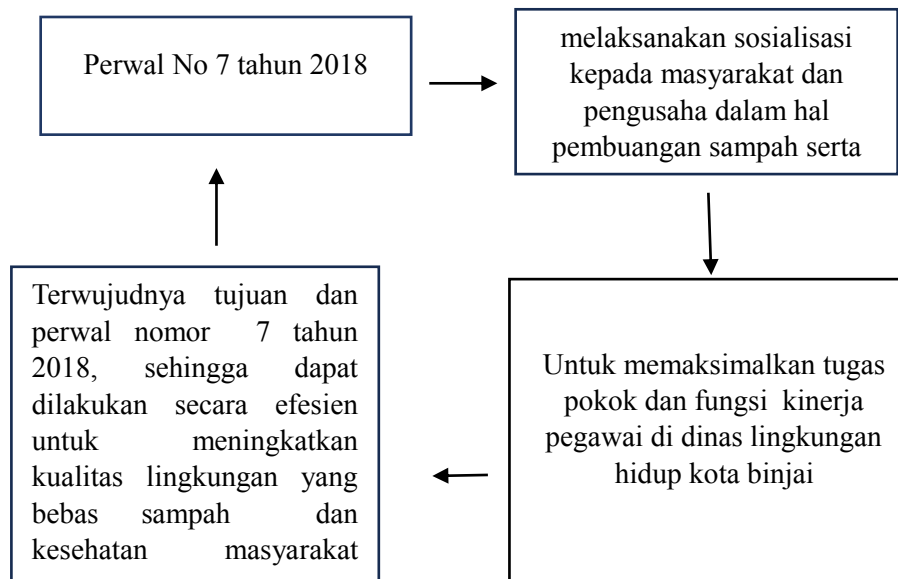
Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau kejadian secara mendalam. Studi deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci masalah yang diselidiki dengan menyelidiki orang, kelompok, atau peristiwa sebanyak mungkin. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sarana penelitian, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk kata-kata dan pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas UPTD Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai

KERANGKA KONSEP



Gambar 3.1 KERANGKA KONSEP

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan defenisi yang secara abstrak menggambarkan suatu peristiwa, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu – ilmu social dan mengabaikan beberapa ciri, jumlah peristiwa, dan keadaan suatu kelompok atau individu tertentu berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep – konsep sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu-individu atau kelompok swasta dengan mengerahkan seluruh sumber- sumber yang ada (dana, SDM, kemampuan organisional) setelah suatu program ditetapkan,

dimana tindakan ini diarahkan untuk mencapai hasil-hasil atau tujuan- tujuan yang telah ditetapkan yang sebelumnya tercapai.

2. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.
3. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah merupakan suatu program yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan di daerah tertentu. UPTD merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti mendidik, mengurus, dan memperbaiki sarana dan prasarana publik.
4. Pengelolaan sampah merupakan suatu fungsi kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk Memelihara kebersihan kota sehingga dapat meningkatkan kualitas perkotaan serta Melakukan upaya untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber yang potensial.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian merujuk pada proses mengelompokkan penelitian berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu guna memahami perbedaan dan

kesamaan antar studi. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami variasi dalam pendekatan, metode, dan tujuan penelitian. Subyek penelitian ini melibatkan pengelolaan sampah serta pemangku kebijakan terkait dengan implementasi peraturan walikota dalam rangka memaksimalkan tugas Unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) pengelolaan sampah di Kota Binjai dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

a. Adanya Kebijakan

Untuk mencapai implementasi Peraturan walikota tentang pengelolaan sampah yang efektif di Kota Binjai, diperlukan kebijakan yang ideal yang mencakup aspek-aspek seperti Sosialisasi dan Edukasi yang Komprehensif, Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten, Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung, Dukungan dan Keterlibatan Semua Pihak. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan implementasi peraturan walikota binjai dalam pengelolaan sampah di Kota Binjai dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kota Binjai.

b. Adanya Kelompok Sasaran

Penerapan Peraturan walikota binjai tentang pengelolaan sampah di Kota Binjai. Membutuhkan strategi yang tepat untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran. Penting untuk diingat bahwa setiap kelompok sasaran memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, strategi edukasi dan komunikasi yang digunakan untuk menjangkau setiap kelompok

sasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif dan tepat sasaran, diharapkan implementasi Peraturan walikota binjai tentang pengelolaan sampah di Kota Binjai dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.

c. Adanya Organisasi Pelaksana

Adapun beberapa organisasi yang berperan dalam Implementasi Peraturan walikota (perwal) tentang pengelolaan sampah di Kota Binjai di Dinas Lingkungan hidup dengan Satuan anggota UPTD Dinas Llingkungan hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lain sebagainya.

d. Adanya Faktor Lingkungan

Beberapa faktor lingkungan yang dapat memengaruhi Implementasi Peraturan walikota binjai tentang pengelolaan sampah di Kota Binjai adalah Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi, Ketidak tegasan Penegakan Hukum, Sarana dan Prasarana yang Tidak Mendukung, Kebiasaan dan Budaya membuang sampah sembarangan dan kurangnya gerakan *go green* dan Faktor Ekonomi.

Dengan menggunakan teori tachjan, peneliti dapat melihat Peraturan walikota (perwal) tentang pengelolaan sampah di Kota Binjai dari berbagai perspektif. Peneliti dapat juga melihat bagaimana kebijakan ideal dirumuskan dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintahan. Peneliti juga dapat melihat bagaimana kelompok sasaran kebijakan menanggapi kebijakan

tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat memahami faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dengan ini peneliti dapat menghasilkan skripsi yang lebih komprehensif dan informatif tentang Peraturan walikota (perwal) tentang pengelolaan sampah .

3.5 Informan

Informan penelitian yaitu subjek atau seseorang yang mempunyai pengetahuan (informasi) tentang objek (sasaran) penelitian, yang lazimnya berkaitan dengan sifat kelembagaan, masyarakat. Selanjutnya informan penelitian ditentukan dengan metode Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Informan dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian yang menjadi key informan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, informan lainnya. Bidang pengelolaan sampah Kota Binjai sebagai bidang yang melaksanakan Tugas UPTD Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai yang terdiri dari :

- a. Kepala bidang pengelolaan sampah
- b. Pegawai bidang pengelolaan sampah
- c. Masyarakat

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Informan

- a. Nama : Rukun S.Pd, MM
- b. Jabatan : Ketua UPTD
- a. Nama : Fahmi S Tarigan, MKM
- b. Jabatan : Staf Administrasi dan keuangan UPTD PS TPA
- a. Nama : Hendra
- b. Jabatan : Anggota UPTD pengelolaan sampah masyarakat
- a. Nama : Hargianto
- b. Jabatan : Masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian dan melalui data yang diperoleh dari sumber informasi melalui wawancara secara langsung maupun melalui observasi di lapangan mengenai tugas UPTD Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber data yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti:

a. Publikasi pemerintah

Publikasi pemerintah seperti sensus penduduk, statistik perdagangan, dan laporan keuangan pemerintah, merupakan sumber data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya tersedia secara gratis atau dengan biaya yang relatif terjangkau.

b. Publikasi ilmiah

Publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan prosiding, juga merupakan sumber data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya ditulis oleh para ahli di bidangnya dan dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini.

c. Situs web

Situs web merupakan sumber data sekunder yang mudah diakses dan dapat diperbarui secara berkala. Data-data yang tersedia di situs web dapat berupa data kuantitatif, seperti data statistik, maupun data kualitatif, seperti data berita dan opini.

3.7 Teknik Analisis Data

Miles dan Hunberman dalam Sugiyono, (2017:42) mengemukakan bahwa aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data kualitatif adalah analisis data interaksi yang meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

a. Reduksi Data (data reduction)

Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan penablean. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

b. Penyajian Data (data display)

Penyajian data dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, data dan informasi yang telah diperoleh dilapangan dimasukkan kedalam suatu teks. Dalam penelitian ini peneliti menuliskan data yang direduksi. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu sehingga kelihatan bentuk yang lebih utuh.

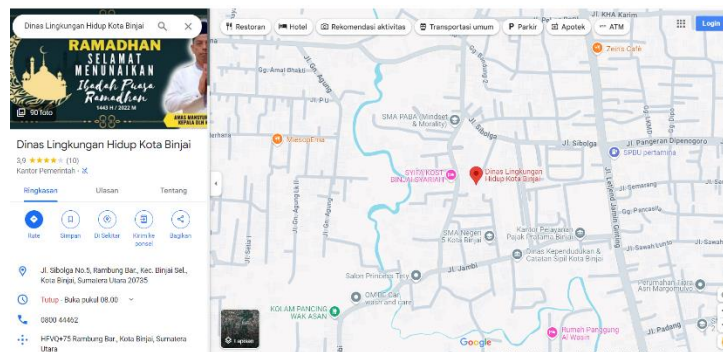
c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih bersifat remang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Verifikasi dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari data yang dikumpulkan, dan dapat menarik kesimpulan tentang apa yang diteliti.

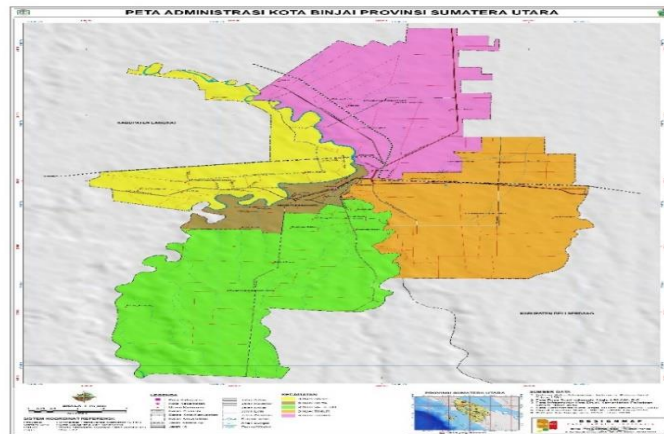
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan Penelitian ini akan dilakukan di Dinas lingkungan hidup Kota Binjai. Waktu penelitian direncanakan awal bulan Agustus. lokasi Dinas lingkungan hidup kota Binjai.



3.2 Gambar Denah lokasi Dinas Lingkungan Hidup

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian



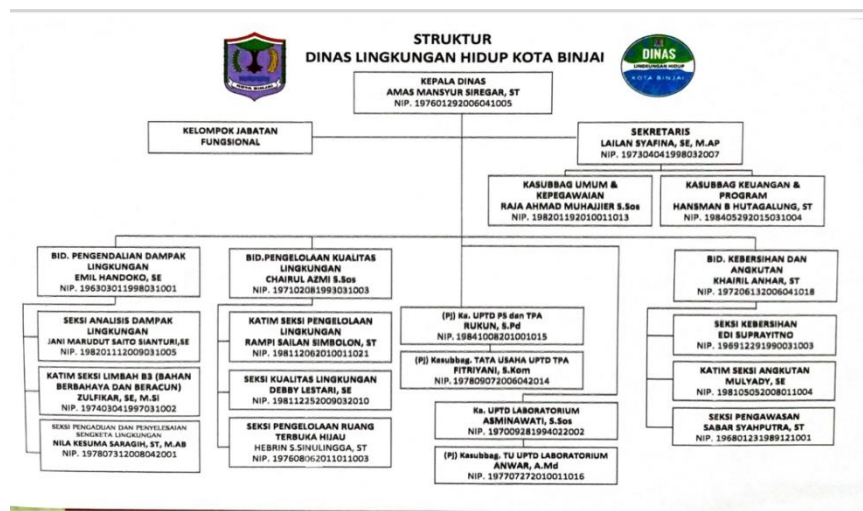
3.3 Gambar peta Kota Binjai

Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas UPTD Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai. Fokusnya mencakup persepsi masyarakat, tingkat kepatuhan, dan efektivitas pengawasan. Kota Binjai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak sekitar 22 km di sebelah barat Ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Sebelum berstatus kota, Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Jumlah penduduk Kota Binjai sebanyak 279.302 jiwa pada tahun 2021, dengan kepadatan 3.095 jiwa/km², dan pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 305.977 jiwa. Letak geografis Binjai 03°03'40"–03°40'02" LU dan 98°27'03"–98°39'32" BT. Ketinggian rata-rata adalah 28 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya, Binjai hanya berjarak 8 km dari Medan bila dihitung dari perbatasan di antara kedua wilayah yang dipisahkan oleh Kabupaten Deli Serdang. Jalan Raya Medan Binjai yang panjangnya 22 km,

9 km pertama berada di dalam wilayah Kota Medan, Km 10 sampai Km 17 berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dan mulai Km 17 adalah berada dalam wilayah Kota Binjai.

3.10 Struktur organisasi Dinas lingkungan hidup kota Binjai

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi. Bagan Organisasi ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu- individu dari kelompok dalam mencapai tujuan.yang telah dilaksanakan. Adapun struktur organisasi yang dimiliki sebagai berikut:



3.4 Gambar Struktur Dinas Lingkungan Hidup

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Bab ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi wawancara yang mendalam kepada setiap informan utama yang menjadi sumber referensi penulis. Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota medan dalam implementasi peraturan walikota binjai Dalam rangka memaksimalkan tugas unit pelaksana teknis daerah (uptd) pengelolaan sampah di kota binjai. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih. Sumber data pada penelitian ini berjumlah 3 orang, tiga (2) orang dari pihak UPTD, satu orang dari Masyarakat pengawai UPTD.

Dalam hal ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data

yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Pemerintahan kota Binjai , yaitu kantor kepala UPTD kota Binjai.

4.4.1 Deskripsi Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh data sebagai berikut :

Dalam mengamati implementasi kebijakan, tindakan administratif sering kali dapat dipelajari pada tingkat program tertentu. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kerja telah disusun, dan pendanaan telah siap serta dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta (organisasi), baik individu maupun kelompok, untuk mencapai suatu tujuan. Penerapan peraturan walikota dalam rangka memaksimalkan tugas UPTD pengelolaan sampah yang telah di terapkan dari tahun 2018. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tersebut masih belum efektif.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Tachjan untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di kota Binjai. Teori ini meyakini bahwa ada empat faktor yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan berhasil, yaitu

adanya unsur pelaksana, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi dan berinteraksi sehingga menimbulkan kondisi munculnya konflik dan memberikan tekanan yang diperundingan antara perumus dan pelaksana yang pada akhirnya dapat membentuk lembaga-lembaga baru Tetapi juga melayani sebagai umpan balik untuk mengurangi ketegangan ini. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, penulis dapat menyajikan data meliputi aspek-aspek yang terkait dalam kategosasi penelitian sebagai berikut :

A. Adanya unsur pelaksana

Dalam menjalankan program pengelolaan sampah yang ada di Kota Binjai maka dibutuhkan kebijakan dan regulasi yang menaungi dan menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Peneliti menanyakan kepada informan mengenai rancangan kebijakan yang menaungi program banksampah dan satgas sampah serta turunan regulasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Binjai.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa belum ada peraturan daerah yang menetapkan pidana hukum ini hanya sebagai peraturan walikota pendukung namun, Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 2024 pukul 10:00 wib dengan Rukun S.Pd, MM selaku Ka uptd Ps dan TPA di Dinas lingkungan hidup dalam rangka memaksimalkan tugas UPTD pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan Apa yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan mengenai Peraturan daerah No 7 tahun 2018

dalam rangka meningkatkan kinerja UPTD dalam dinas lingkungan hidup di kota Binjai yang di inginkan UPT pengelolaan sampah dan TPA?

“Sekarang gini nya kita itu dalam tentang pengelolaan sampah kita punya basic dan dasar, dasar itu namanya kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan segala jenis sampah rumah tangga dan itu bisa dilihat di internet strada kota binjai, disitu ada penelitian jurnal nya juga itu penelitian saya sendiri yang mendukung nanti yang tentang pengelolaan sampah di kota binjai, jadi kalau untuk hambatan namanya sampah itu salah satu pekerjaan yang sulit itu adalah mengubah pola pikir manusia jadi untuk pengelolaan sampah itu sama saja dengan mengubah pola pikir manusia, tetapi bagaimana cara mengubah pola pikir manusia supaya sampah itu bisa di manfaat kan dengan baik sehingga di TPA itu sulit, jadi hambatan pengelolaan sampah itu ya di pola pikir manusia itu, pola pikir masyarakat itula yang utama paling sulit mengubah nya, jadi hambatan tersulit untuk pengelolaan sampah di kota binjai jangan kan di kota binjai di indonesia sendiri lah, jadi kendalanya itu tadi di sdm nya jadi sdm ini tidak semuanya memadai gitu “

Selain itu , apakah adaa Di dalam ofektiv pengelolaan sampah ini terdapat program kinerja pengelolaan sampahnya ga pak?

“ada”

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat penghambat dalam mengimplementasikannya pak ?

“jadi disposisi itu kan arahan arahan dari pimpinan jadi dari bapak ini hanya mendisposisikan apapun kesaya sayalah yang mendisposisikan ke mereka, jadi mereka itu disposisi itu kurang memahami dia yang menyebabkan kami itu program nya juga lambat gitu lambat karena disposisinya lambat terus sdm nya pun terbatas yang untuk mengerjakan mengerjakan ini jadi dia sudah ada bidangnya masing masing .Jadi kami itu bergerak berdasarkan undang undang dan peraturan juga, jadi uptd pengelolaan sampah ini bergerak berdasarkan peraturan walikota binjai nomor 26 tahun 2021 disitulah ada semua tentang pengelolaan sampah semua segala macam disitu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa unsur pelaksana berkaitan dengan tingkat kepatuhan para pelaksana dan petugas lapangan dalam implmentasi kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup maksimal, walaupun masih ada juga aparatur dan petugas lapangan yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada..

B. Adanya Program yang dilaksanakan

Kebijakan administratif masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program – program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program Hal ini seperti dikemukakan atau Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut

tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. Seperti halnya dalam manajemen pengelolaan sampah di Dinas lingkungan hidup kota Binjai .

Apakah peraturan walikota No 7 tahun 2018 ini mengenai UPTD pengelolaan sampah yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk saat ini berjalan sesuai dengan yang di tetapkan dan Apa rencana upt pengelolaan sampah ini untuk kedepannya untuk memastikan publik ini terus tercapai dan berkembang?

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa belum ada peraturan daerah yang spesifik, Jakstrada ini hanya sebagai peraturan daerah pendukung namun , Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 2024 pukul 10:00 wib dengan Rukun S.Pd, MM selaku Ka uptd Ps dan TPA di Dinas lingkungan hidup dalam rangka memaksimalkan tugas UPTD pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan .

“dapat kita lihat sendiri bahwasannya peraturan tersebut sudah ditetapkan dan berjalan namun masih kurangnya sarana maupun prasarana yang di tetapkan oleh pihak dinas baik dan segi tenaga kerja jadi, kedepannya kita buat program terus tetap buat kita kalau di pemerintahan ini. rencana kerja itu kita tetap buat setiap tahunnya yang harus kita lakukan kita tetap buat rumah kompos, tetap buat ini segala macam itu tetap buat cuman mungkin saat ini itu

belum menjadi prioritas gitu masih ada protes protes yang lain yang harus di selesaikan jadi itu belum ada di prioritas belum di prioritaskan menurut saya, tapi seadanya aja sekarang kami masih berjalan kok back sampah itu tetap berjalan.”

Sedangkan menurut Bapak Fahmi S Tarigan, MKM selaku Staf Administrasi dan keuangan UPTD PS TPA bahwasnya: “ *dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, dinas sosial, dan juga sebenarnya dinas pariwisata juga ikut dalam melestarikan go green yang dimana kota yang bebas akan sampah , limbah dsb. Sebenarnya dalam hal ini hanya saja harus adanya gerakaab pemerintah dalam bersoisalisasi kepada masyarakat bagaimana dalam menabgani berbagai jenis sampah agar timbulnya suatu motivasi dari diri sendiri agar lebih baik mengutip dari pada membuang sembarangan. Jika suatu saat mulai satu persatu masyarakat menjaga kebersihan maka semakin lama akan menjadi habbit baru untuk masyarakat”*. (hasil wawancara di dinas lingkungan hidup kota Binjai 8 Agustus 2024).

Kalau boleh tau bisa ceritain ga pak program apa saja yang terlibat dalam teknis pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kota Binjai dan tujuan dari masing masing program apa saja yang dilakuin UPTD?

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa belum ada peraturan daerah yang spesifik, Jakstrada ini hanya sebagai peraturan daerah pendukung namun, Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 2024 pukul 10:00 wib dengan Rukun S.Pd, MM selaku Ka uptd Ps dan TPA

di Dinas lingkungan hidup dalam rangka memaksimalkan tugas UPTD pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan bahwa *“Jadi dalam menjalankan kebijakan peraturan tersebut kami telah membuat progra namun, program itu sudah berjalan sejak tahun 2000, UPTD ini kan terbentuk tahun 2017 jadi di 2018 itu kami sudah punya program nama program yang pertama itu mengutip sampah, kedua lubang viewpoint, ketiga rumah kompos, ke empat pembuatan eco break dma banyak lagi, jadi itu terus berjalan, kemudian di tahun 2020 itu terkena covid jadi beberapa anggaran itu di prioritaskan sebagai covid, jadi program program itu tidak berjalan lagi, tapi yang sampai saat ini berjalan itu paint sampah , paint sampah ini tidak dikami lagi mereka sudah pindah ke bidang sebelah namanya PKL, PKL ini kualitas lingkungan karena dia angkat sampah itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas lingkungan jadi mereka pengendali kualitas lingkungan, jadi mengutip sampah itulah salah satu program yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan, kalau untuk di TPA pengelolaan sampah kita hanya berdasarkan dari TPA kita ada disitu rumah kompos tapi tidak juga berjalan karena beberapa waktu yang lalu mesin kita itu dicuri jadi gabisa lagi berjalan, dulu kita itu punya mesin mesin nya itu pecacak sampah jadi sampah organik itu di kumpulkan di cacak disana jadi kompos tapi sekarang gak ada lagi, kemudian sampai saat ini pengelolaan sampah itu hanya pengelolaan sampah di TPA dengan cara sistem pertholenfield itu aja dia untuk pengelolaan sampah.”*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada bapak hendra selaku anggota

bahwasannya Berarti kalau kendala atau tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan program program tersebut itu ada gak selain itu? “ *Kalau untuk kendala itu banyak juga tantangan nya itu tadi anggaran mungkin kita saat ini masih kurang yang pertama ya, yang kedua untuk sdm nya juga kita kurang sdm yang mengerti tentang pengelolaan sampah itu di masyarakat terus yang ketiga untuk fasilitas juga kita ada di sediakan pemerintah tapi karena mungkin itu tadi taulah sekarang kayak mana kota binjai , jadi itu tadi kayak hilang gak nampak, jadi satu satunya cara yang sekarang ini dibuat ya itu tadi, program back sampah setiap hari rabu dan jumat”.*

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 2024 dengan Pak hargianto masyarakat di sekitar di Dinas lingkungan hidup Kota Binjai dengan pertanyaan, Bagaimana upaya Kota Binjai dalam menghadapi hambatan dalam pengawasan penanggulangan yang dilakukan. Menurut beliau, *upaya yang dapat dilakukan ialah agar kendala ataupun hambatan tersebut tidak berlanjut ialah lebih mengenalkan program-program yang Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai telah ciptakan melalui beberapa pendekatan seperti mengupdate pemberitahuan ataupun informasi terkini mengenai pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan. Serta terjun langsung ke lapangan sehingga masyarakat juga turut serta agar mengetahui kegiatan apa saja yang akan ataupun telah dilakukan oleh Unit pelaksana teknis daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa program yang dilaksanakan telah terkoordinasi dengan baik

dan telah adanya standar operating procedur (SOP) namun untuk pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi standar operating prosedur (SOP). Sedangkan untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan perda tentang pengelolaan sampah di kota Binjai sudah jelas. Program dalam suatu kebijakan sangat diperlukan dalam keberhasilan suatu kebijakan.

C. Target group atau kelompok sasaran

Target group dalam perwal tdalam meningkatkan kinerja UPTD pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup kota Binjai adalah bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa belum ada peraturan daerah yang spesifik, Jakstrada ini hanya sebagai peraturan daerah pendukung namun , Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 2024 pukul 10:00 wib dengan Rukun S.Pd, MM selaku Ka uptd Ps dan TPA di Dinas lingkungan hidup dalam rangka memaksimalkan tugas UPTD pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan bahwsannya “ *benar yang utama nya itu di masyarakat itu sendiri dulu ada namanya gerakan pilah sampah itu tahun 2019 kalau saya gak salah gerakan pilah sampah itu kita buat itu kita bagikan ke nbr yang tertutup jadi yang organik sama yang anorganik nanti anorganik nya itu dibuat disetor ke kelurahan di kelurahan itu dibuat back sampah kita berdaya ke masyarakat disitu terus lambat laun namanya juga sampah itukan kalau dia*

dibuat pas untung kalau enggak ya gak untung namanya sampah itukan emang kita gabisa makan dari situ kan kecuali yang kayak udang udang besar itu kan, kalau untuk yang kecil ini kan gabisa kita makan dari situ itukan hanya sebagai untuk sampingan jadi ya lama lama biar sampahnya tertutup juga, jadi programnya pun gak jalan juga terus dihambat, jadi dulu banyak program tapi dihambat covid ini semuanya hancur karena kan kita gak bisa tatap muka jadi kayak back sampah pun dulu kenak covid tutup rumah kompos tutup gaboleh kerumah rumah, warga warga pun takut kita datang kan, jadi sampai sekarang belum ada pembangunan lagi untuk program terus kami pun karena sudah tercepah kami hanya mengurus untuk kompos sedangkan back sampah sudah diurusi oleh bidang kualitas lingkungan “.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 Agustus 2024 pukul 10:00 wib dengan Hendra TPA di Dinas lingkungan hidup dalam rangka memaksimalkan tugas UPTD pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan bahwasannya

“Saya sebagai anggota hanya dapat menjalankan pengangkutan bak sampah dengan mengelilingi rute rute yang telah ditetapkan . jadi , untuk perihal program yang di buat oleh dinas lingkungan hidup saya juga kurang paham saya hanya menjalankan sebagaimana pekerjaan saya”.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 Agustus 2024 dengan Hargianto di sekitar TPA di Dinas lingkungan hidup dalam rangka memaksimalkan tugas UPTD pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan bahwasannya

“Saya sebagai anggota hanya dapat menjalankan pengangkutan bak sampah dengan mengelilingi rute rute yang telah ditetapkan . jadi , untuk perihal program yang di buat oleh dinas lingkungan hidup saya juga kurang paham saya hanya menjalankan sebagaimana pekerjaan saya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa untuk mencapai Keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari respon atau daya tanggap kelompok sasaran. Jika kelompok sasaran bersedia menerima dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh, maka kebijakan tersebut akan berhasil.

D. Faktor lingkungan sosial budaya dan politik

Faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi Peraturan walikota tentang teknis UPTD dalam pengelolaan sampah adalah unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa belum ada peraturan daerah yang spesifik, Jakstrada ini hanya sebagai peraturan daerah pendukung namun , Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 2024 pukul 10:00 wib dengan Rukun S.Pd, MM selaku Ka uptd Ps dan TPA di Dinas lingkungan hidup dalam rangka memaksimalkan tugas UPTD pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan bahwsannya

“Point point dari pengelolaan sampah ini sumber daya kurang bahwa kondisi ekonomi sosial politik itu memengaruhi kenapa kondisi ekonomi sosial politik kondisi ekonomi pegawai setiap orang kan beda beda ada yang janda anaknya 4 gtu istilahnya dia gak terpikir untuk kerja dulu gitu dia tapi dia mau set job lagi

yang lain kan gitu itu kan berpengaruh terhadap peraturan peraturan yang dibuatkan seharusnya kan kita standby disini itulah dia". Ujarnya.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Terkait hal yang harus dilihat supaya bisa menilai kinerja pelaksanaan kebijakan ialah sejauh mana lingkungan luar ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak mendukung bisa menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena sebab itu, upaya pelaksanaan kebijakan memberi syarat keadaan lingkungan luar yang mendukung. Kegiatan implementasi suatu kebijakan tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan.

4.2 pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan dengan para narasumber di Dinas UPTD kota binjai serta pegawai dinas terkait faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Adanya unsur pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa unsur pelaksana berkaitan dengan tingkat kepatuhan para pelaksana dan petugas lapangan dalam implmentasi kebijakan pengelolaan belum maksimal, walaupun masih ada juga aparatur dan petugas lapangan yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada. Sedangkan kalau untuk insentif/reward diberikan bagi orang yang melakukan pengurangan sampah serta pengolahan sampah, belum ada

karena masih terkendala dengan anggaran biaya. Unsur para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan sangat menentukan akan keberhasilan suatu kebijakan. Tachjan merujuk unsur pelaksana kebijakan yakni merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak cuma mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Mengacu pada penelitian ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di kota Binjai sudah cukup maksimal, para pelaksana kebijakan sudah mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dan telah melaksanakan tupoksi sesuai dengan peraturan yang ada. walaupun, terkadang masih ada juga para pelaksana yang mengerjakan tupoksi di luar peraturan.

Dengan adanya kebijakan publik dalam penelitian maka dapat kita tarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwasannya unsur pelaksanaan pengelolaan sampah kota binjai belum berjalan secara optimal dapat dilihat dari belum adanya penegakkan yang kondusif dan efisien seperti adanya reward performa kinerja terhadap pegawai, bukan hanya itu belum ada prosedur terbaru pengelolaan sampah yang dibuat hanya untuk melengkapi secara administrasi saja tetapi dalam pelaksanaan Tindakannya tidak dilakukan.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa program yang dilaksanakan telah terkoordinasi dengan baik dan telah adanya standar operating prosedur (SOP) namun untuk pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi standar operating prosedur (SOP). Sedangkan untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan perda tentang pengelolaan sampah di kota Binjai sudah jelas. Program dalam suatu kebijakan sangat diperlukan dalam keberhasilan suatu kebijakan. Dimana walaupun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan sudah memadai, para pelaksana sudah mengetahui apa yang akan dilakukan, serta adanya keinginan para pelaksana dalam melakukan kebijakan, namun meskipun semua itu telah terpenuhi namun jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi maka kemungkinan suatu kebijakan tidak akan terlaksana atau terealisasi. Faktor penghambat implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di kota Binjai Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka peneliti memperoleh informasi bahwa adapun yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di kota Binjai yaitu pertama, adanya unsur pelaksana kebijakan :

Kurangnya penegakan hukum dalam kebijakan, terbatasnya SDM yang ahli di bidang persampahan, TPS, TPS 3R serta kurangnya armada pengangkut sampah dan masih terbatasnya anggaran dana operasional dalam pengelolaan sampah. serta kurangnya anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi. program yang dilaksanakan : masih ada beberapa

petugas/pelaksana yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Ketiga, kelompok sasaran : masih ada aparat yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada sehingga tujuan yang telah ditetapkan bersama tidak sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa sejauh ini dalam Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Binjai sudah mempunyai standart Operating Prosedur (SOP) yang jelas baik itu mekanisme dalam pelaksanaannya, sistem dan prosedur dalam pelaksanaannya, serta tupoksi dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh para pelaksana terkait kebijakan pengelolaan sampah. Namun untuk pelaksanaan di lapangan Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti menemukan walaupun dalam pelaksanaan kebijakan sudah mempunyai Standar Operating Procedure (SOP) namun pada kenyataannya di lapangan masih ada para pelaksana/petugas yang belum sepenuhnya memenuhi standar operating prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk penyebaran tanggung jawab kepada pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Binjai telah disebarkan secara jelas dan sudah terstruktur dalam struktur organisasi pelaksana sesuai dengan petunjuk teknis kebijakan yang dikeluarkan Bupati, dan struktur organisasi telah terkoordinasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai masih ada para pelaksana yang menjalankan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Pihak dinas lingkungan hidup telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut seperti berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pihak dinas lingkungan hidup selalu memberikan arahan dan instruksi agar para pelaksanaan dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Binjai mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Tetapi seperti yang dapat kita lihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan masih belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah sembarangan, serta tidak adanya prosedur pengelolaan sampah yang dibuat hanya untuk sebagai formalitas ketentuan SOP ternyata dalam segi pelaksanaan tidak berjalan.

3. Adanya kelompok sasaran

Selanjutnya, Indikator implementasi kebijakan menurut tachjan yaitu: adanya kelompok sasaran. Mereka orang-orang yang paling dipengaruhi oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah kota Binjai oleh perumusan kebijakan. Kelompok sasaran secara khusus dalam hal ini adalah masyarakat kota Binjai. tachjan (2006:25).

Kelompok sasaran adalah sekelompok orang dengan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku serupa, yang menjadi sasaran strategi pemasaran suatu perusahaan. Kelompok sasaran adalah bagian dari pihak-pihak yang terlibat diharapkan untuk mengadopsi strategi pemasaran perusahaan. model interaksi yang diinginkan. Mereka termasuk pemangku kepentingan yang diharapkan menerima dan beradaptasi dengan model interaksi yang

ditentukan oleh kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari respon atau daya tanggap kelompok sasaran. Jika kelompok sasaran bersedia menerima dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh, maka kebijakan tersebut akan berhasil.

Apa yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi atau beradaptasi terhadap kebijakan yang diterapkan bergantung pada:

- a. Sejauh mana isi kebijakan sesuai dengan harapan mereka
- b. Karakteristik masing-masing kelompok sasaran seperti gender, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan status sosial ekonomi,
- c. Adanya komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementer) dan penerima manfaat kebijakan (target group), sehingga komunikasi yang buruk menjadi kelemahan implementasi kebijakan yang efektif. Kelompok sasaran yang terkait dengan penerapan peraturan walikota tentang tugas Uptd pengelolaan sampah di kota Binjai.

Bedasarkan dari hasil wawancara dan observasi dalam penelitian terhadap tupoksi Uptd dapat kita simpulkan bahwa kurangnya kinerja sumber daya manusia. Peneliti menemukan informasinya belum ada pegawai yang ditetapkan secara khusus untuk mengatasi pengelolaan sampah. seperti yang telah ditetapkan dinas lingkungan hidup. Pegawai yang bekerja tidak berjalan sesuai dengan porsinya yang dimana kinerja pegawai yang ditetapkan sebagai tugas menyapu sampah jalanan, mengangkut sampah saja merangkap untuk mengatasi persoalan sampah

tersebut seperti yang telah di ungkapkan oleh bapak rukun serta inromasi yang kurang tersampaikan kepada masyarakat mengenai program pengelolaan sampah .

4. Adanya faktor lingkungan,sosial,budaya dan politik

Terkait hal yang harus dilihat supaya bisa menilai kinerja pelaksanaan kebijakan ialah sejauh mana lingkungan luar ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak mendukung bisa menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Karena sebab itu, upaya pelaksanaan kebijakan memberi syarat keadaan lingkungan luar yang mendukung. Kegiatan implementasi suatu kebijakan tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya adalah salah satu faktor yang berarti dalam melakukan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf yang mencukupi serta keahlian - keahlian yang baik untuk melakukan tugas-tugas mereka, informasi,wewenang serta fasilitas yang dibutuhkan untuk menterjemahkan pendapat pendapat diatas kertas agar bisa melakukan pelayanan-pelayanan publik Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan itu meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan/anggaran, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan sebagainya). Tapi dari ketiga sumber daya tersebut yang paling penting adalah sumber daya manusia karena tanpa adanya manusia maka sumber daya – sumber daya yang lain tidak dapat di

dapatkan, tetapi sumber daya manusia pun harus cukup jumlah orang yang dibutuhkan dan juga mempunyai keahlian yang cukup. Seperti kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan sampah, kurang ketertarikan para kader pengelolaan sampah, dan kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah. Selanjutnya kurangnya sarana prasarana seperti armada pengangkut sampah, kurang optimalnya Pemerintah memberikan motivasi untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah, anggaran dari APBD sangat minim, belum sadarnya masyarakat kota Binjai dalam menegakkan kebijakan pengelolaan sampah seperti penetapan membayar retribusi sampah.

Maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan dengan para narasumber di Dinas UPTD kota binjai serta pegawai dinas terkait faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu belum maksimalnya kinerja pegawai yang di karenakan masih kurang nya Sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tugas serta kurangnya sarana maupun prasarana yang di tetapkan Dinas terhadap bak angkutan ataupun masyarakat yang membuang sampah di sembarangan di kota Binjai. Belum ada prosedur pengelolaan sampah yang buat hanya untuk melengkapi secara administrasi saja tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Binjai sudah memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Binjai

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 dalam rangka memaksimalkan tugas unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pengelolaan sampah di Kota Binjai dapat disimpulkan bahwasannya belum terimplementasi. Hal ini berdasarkan :

a. Adanya unsur pelaksana

Berdasarkan pelaksana berkaitan dengan tingkat kepatuhan para pelaksana dan petugas lapangan dalam implmentasi kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup maksimal, walaupun masih ada juga aparatur dan petugas lapangan yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada. Sedangkan kalau untuk insentif/reward diberikan bagi orang yang melakukan pengurangan sampah serta pengolahan sampah, belum ada karena masih terkendala dengan anggaran biaya. Unsur para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan sangat menentukan akan keberhasilan suatu kebijakan.

b. Adanya program yang dilaksanakan

Bahwa berdasarkan program yang dilaksanakan telah terkoordinasi dengan baik dan telah adanya standar operating procedur (SOP) namun untuk pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi standar operating prosedur (SOP). Sedangkan untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan perda tentang pengelolaan sampah

di kota Binjai sudah jelas. Program dalam suatu kebijakan sangat diperlukan dalam keberhasilan suatu kebijakan.

c. Adanya kelompok sasaran

Kelompok sasaran adalah bagian dari pihak-pihak yang terlibat diharapkan untuk mengadopsi strategi pemasaran perusahaan. model interaksi yang diinginkan. Mereka termasuk pemangku kepentingan yang diharapkan menerima dan beradaptasi dengan model interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari respon atau daya tanggap kelompok sasaran. Jika kelompok sasaran bersedia menerima dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh, maka kebijakan tersebut akan berhasil.

d. Adanya faktor lingkungan, sosial, budaya dan politik

Terkait hal yang harus dilihat supaya bisa menilai kinerja pelaksanaan kebijakan ialah sejauh mana lingkungan luar ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak mendukung bisa menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena sebab itu, upaya pelaksanaan kebijakan memberi syarat keadaan lingkungan luar yang mendukung. Kegiatan implementasi suatu kebijakan tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya adalah salah satu faktor yang berarti dalam

melakukan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf yang mencukupi serta keahlian - keahlian yang baik untuk melakukan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang serta fasilitas yang dibutuhkan untuk menterjemahkan pendapat pendapat diatas kertas agar bisa melakukan pelayanan-pelayanan publik Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan itu meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan/anggaran, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan sebagainya).

5.2 Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam memaksimalkan tugas UPTD Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Binjai adalah sebagai berikut:

- a. Kepada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Binjai disarankan untuk menugaskan pegawai secara khusus pengelolaan sampah menyediakan armada angkutan sampah secara khusus mengangkut sampah yang ada di Kota binjai secara oprasional waktu pengangkutannya
- b. Kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bersama menjaga kebersihan lingkungan dimana mereka tinggal.
- c. Kepada Pemerintah Kota Binjai disarankan membuat kebijakan terkait penegakan hukum terhadap orang/organisasi yang membuang sampah sembarang atau tidak pada tempatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G Soebarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab, Solichin, (2008). analisis kebijakan dan formula ke implementasi. *Kebijkasanaan negara* , Jakarta : Pt.Bumi Aksara.
- Ag,Subarsono. (2011).” *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori Aplikasi “)*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2008). *Evaluasi kebijakan publik*. Sukoharjo: Penerbit Tahta media group,
- Ferdika, S., Ermanovida, E., & Junaidi. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 25–34. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.27>
- Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai
- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Keijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir,M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Quade, E.S. (1984) *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.
- Robert K.Yin. (n.d.). *Case Study Research_ Design and Methods*, Third Edition, *Applied Social Research Methods Series*, Vol 5 (2002).pdf.
- Salusu, Jonathan. (2003). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo
- Tachjan, H. (2006). “*Implementasi Kebijakan Publik.*” Aipi Bandung – Puslit Kp2w Lemit Unpad Bandung.
- Wahab, Abdul Solichin. (2016). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Wahab, Solichin A. (1991). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta.
- Waluyo. (2007). “*Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*”. Bandung: Mandarmaju.
- Winarno Budi. (2002). *KEBIJAKAN PUBLIK teori, proses, dan studi kasus*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Winarno Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* . Edisi Revisi. Jakarta:PT.Buku Kita.
- Wisesa Hree Galung, Hidayat Zainal, Widowati Nina faktor faktor yang mempengaruhi implementasi UT.pdf

Internet :

- Dye dalam Dwiyanto Indiahono. (2009). Implementasi kebijakan pelarangan alat tangkap cangtrang di kabupaten rembang . Journal of Public Policy and Management Review. Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/10898/10574>
- Farantika Iis Hermaeny. (2010). *Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Kecamatan Karangdowo Klaten*.(Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Grandle. (1980). Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non Usaha Mikro Kecil (UMK) Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol.4, No. 3, September2023 https://www.academia.edu/download/61045250/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b_120191028-16634-1fq32g7.pdf
- hamdi. (2014). Implementasi faktor faktor kebijakan, electronic traffic law enforcement (ETLE) dan kepatuhan berlalu lintas di wilayah hukum kota makassar. Tesis politeknik STIA LAN Makassar. Makassar <https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/448/>
- Harsono. (2002). Implementasi kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di dinas perikanan dan kelautan di kabupaten mandailing natal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]Vol 2Nomor 1Januari 2022, Tinjauan literatur <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/viewFile/825/872>

Hree Galung Wisesa, Zainal Hidayat, Nina Widowati. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang (Solusi Pengurangan Timbunan Sampah Di Tpa Jati Barang)*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, S.H Tembalang : Semarang. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/93167-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implemen.pdf>

<https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/2667/2220>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/25346/25033>

<https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/448/8/14.%20BAB%20II%20STUDI%20PUSTAKA.pdf>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103037/perwali-kota-binjai-no-7-tahun-2018>

https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/30150000067_rencana_strategis.pdf

<https://www.academia.edu/downloadv>

https://www.researchgate.net/publication/365191473_Hambatan_Implementasi_Kebijakan_Pengelolaan_Sampah_Rumah_Tangga_di_Kota_Binjai

Mazmanian.(2007).Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/12674/8575>

Muharly Fadli .(2018). *Efektivitas Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Pegawai Sekretariat Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan*.(Skripsi, fakultas lembaga administrasi negara, STIA LAN: Makassar). Diakses dari <https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/139/1/09.%20FADLI%20MUHARLY.pdf>

Miles dan Hunberman dalam Sugiyono. (2017). Analisis kebutuhan multimedia interaktif berbasis PowerPoint materi aljabar pada pembelajaran matematika SMP. Jurnal pengajaran dan pendidikan matematika Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jp3m/article/download/sak71/1655>

- Moleong. (2005). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. *Jurnal Governace*. Vol.1, No. 1, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/34304/32267>
- Pasolong. (2008). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *JURNAL ILMIAH WAWASAN INSAN AKADEMIK* Volume I, Nomor 3, 2018. https://www.researchgate.net/profile/DianHerdiana/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar/links/5ddb51ad458515dc2f4b787e/Sosialisasi-Kebijakan-Publik-Pengertian-dan-Konsep-Dasar.pdf
- Saryono. (2010). Telaah Kurikulum Dalam Mapel Aqidah Akhlak Di MTs IT AT-TAUHID Kampung Tauhid Sriwijaya. *Jurnal Pendidikan dan ilmu bahasa*. Vol 2. No 2. 2024. <https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Perspektif/article/download/1256/1318>
- Suharno. (2010). Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun. *Jurnal Medan area university repository* <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/619/5/118520019file5.pdf>
- Sofi Hifzil Maulana. (2020). *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social, Uin Suska: Riau). Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/46478/1/GABUNGAN%20TANPA%20BAB%20V.pdf>
- Udoji. (1981). Implementasi kebijakan sampah di kota manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/23860/23510>
- Wahab. (2001). Pelaksanaan asas akuntabilitas dalam pelaksanaan kesehatan pada puskisman kota banda aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 7 Nomor 2, Mei 2022 <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/20181/10420>
- Wahab. (2004). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Bersehati Kecamatan Wenang Kota Manado. Indra R. Tilolango https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna_komunikasi/article/download/2667/2220

Wahab. (2008). Persepsi kaum ibu terhadap program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 4, November 2017 <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/viewFile/5465/2612>

winarno. (2007). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure terhadap Profitabilitas Perusahaan. Jurnal ekonomi akuntansi dan manajemen vol 17 Nomor 1, tahun 2020
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/5108>

LAMPIRAN



Wawancara dengan pihak Staf Administrasi dan Keuangan UPTD PS TPA Dinas
Lingkungan Hidup Kota Binjai



wawancara dengan pihak Unit pengelola sampah





Dokumentasi Penelitian Sampah Di Bagian Binjai Utara

LAMPIRAN I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dhimas Prayuda
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai/ 03 januari 2002
NPM : 2003100014
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kl. Yos Sudarso LK.II Kel. Jati
utomo
Anak : 1 (Satu) Dari 2 (Dua) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Bambang Efri Prayudi
Ibu : Hamidah
Alamat : Jl. Kl. Yos Sudarso LK.II Kel. Jati
Utomo

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 025282 Binjai
2. SMP Negeri 11 Binjai
3. SMA 1 Binjai Kab. Langkat
4. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 21 Agustus 2024

Dhimas prayuda

LAMPIRAN II

DRAF WAWANCARA

DRAF WAWANCARA

NAMA : DHIMAS PRAYUDA
NPM : 2003100014

Acc
Draf Wawancara
14/6 - 24

Judul penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai

➤ **Adanya upaya untuk mencapai tujuan**

Pertanyaan :

1. Bagaimana masyarakat luas dapat mendukung upaya UPTD untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah?
- ② Apa yang menjadi kendala dalam upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai UPTD pengelolaan sampah?
3. Apa rencana UPTD ke depan untuk memastikan upaya dalam pengelolaan sampah ini terus berlanjut dan berkembang?

➤ **Adanya program yang bersifat operasional**

Pertanyaan :

- ① Bisakah bapak/ibu menjelaskan tujuan dari masing-masing program yang dilaksanakan?
2. Bagaimana respon dan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang bapak/ ibu jalankan ?
- ③ Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut?

➤ **Adanya keputusan terkait dengan permasalahan**


Pertanyaan :

1. Apakah permasalahan dalam pengelolaan sampah di kota binjai merupakan permasalahan serius?
- ② Langkah apa saja yang sudah dilakukan PUTD pengelolaan sampah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di peraturan ini?
- ③ Bagaimana peran UPTD pengelolaan sampah dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat?

➤ **Adanya proses dalam melaksanakan suatu kebijakan publik**

Pertanyaan :

1. Bagaimana respons dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan ini? Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini?
- ② Apa rencana UPTD pengelolaan sampah kedepan untuk memastikan kebijakan publik ini terus tercapai dan berkembang?



3. Apakah ada strategi atau inisiatif yang dilakukan oleh UPTD pengelolaan sampah untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini di masa mendatang?

DRAF WAWANCARA

NAMA : DHIMAS PRAYUDA
NPM : 2003100014

Judul penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai

➤ **Adanya upaya untuk mencapai tujuan**

Pertanyaan :

1. Bagaimana masyarakat luas dapat mendukung upaya UPTD untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah?
2. Apa yang menjadi kendala dalam upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai UPTD pengelolaan sampah?
3. Apa rencana UPTD ke depan untuk memastikan upaya dalam pengelolaan sampah ini terus berlanjut dan berkembang?

➤ **Adanya program yang bersifat operasional**

Pertanyaan :

1. Bisakah bapak/ibu menjelaskan tujuan dari masing-masing program yang dilaksanakan?
2. Bagaimana respon dan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang bapak/ibu jalankan ?
3. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut?

➤ **Adanya keputusan terkait dengan permasalahan**

Pertanyaan :

1. Apakah permasalahan dalam pengelolaan sampah di kota binjai merupakan permasalahan serius?
2. Langkah apa saja yang sudah dilakukan UPTD pengelolaan sampah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di peraturan ini?
3. Bagaimana peran UPTD pengelolaan sampah dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat?

➤ **Adanya proses dalam melaksanakan suatu kebijakan publik**

Pertanyaan :

1. Bagaimana respons dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan ini? Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini?
2. Apa rencana UPTD pengelolaan sampah kedepan untuk memastikan kebijakan publik ini terus tercapai dan berkembang?
3. Apakah ada strategi atau inisiatif yang dilakukan oleh UPTD pengelolaan sampah untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini di masa mendatang?

➤ **Pengelolaan sampah**

Apa yang menjadi kendala dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan UPTD pengelolaan sampah dan TPA?

1. Menurut bapak Rukun S.Pd, MM selaku Ka uptd Ps
 Sekarang ini nya kita itu dalam tentang pengelolaan sampah kita punya basic dan dasar, dasar itu namanya kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan segala jenis sampah rumah tangga dan itu bisa dilihat di internet strada kota binjai, disitu ada penelitian jurnal nya juga itu penelitian saya sendiri yang mendukung nanti yang tentang pengelolaan sampah di kota binjai, jadi kalau untuk hambatan namanya sampah itu salah satu pekerjaan yang sulit itu adalah mengubah pola pikir manusia jadi untuk pengelolaan sampah itu sama saja dengan mengubah pola pikir manusia, tetapi bagaimana cara mengubah pola pikir manusia supaya sampah itu bisa di manfaat kan dengan baik sehingga di TPA itu sulit, jadi hambatan pengelolaan sampah itu ya di pola pikir manusia itu, pola pikir masyarakat itula yang utama paling sulit mengubah nya, jadi hambatan tersulit untuk pengelolaan sampah di kota binjai jangan kan di kota binjai di indonesia sendiri lah, jadi kendalanya itu tadi di sdm nya jadi sdm ini tidak semuanya memadai gitu

Di dalam ofektiv pengelolaan sampah ini ada program nya ga pak?

Ada

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat penghambat dalam mengimplementasikannya pak ?

"jadi disposisi itukan arahan arahan dari pimpinan jadi dari bapak ini hanya mendisposisikan apapun kesaya sayalah yang mendisposisikan ke mereka, jadi mereka itu disposisi itu kurang memahami dia yang menyebabkan kami itu program nya juga lambat gitu lambat karena disposisinya lambat terus sdm nya pun terbatas yang untuk mengerjakan mengerjakan ini jadi dia sudah ada bidangnya masing masing .Jadi kami itu bergerak berdasarkan undang undang dan peraturan juga, jadi uptd pengelolaan sampah ini bergerak berdasarkan peraturan walikota binjai nomor 26 tahun 2021 disitulah ada semua tentang pengelolaan sampah semua segala macam disitu".

Kalau boleh tau bisa ceritain ga pak tujuan dari masing masing program apa saja yang dilakuin UPTD?

Jawaban:

2. Menurut bapak Rukun S.Pd, MM selaku Ka uptd Ps
 Jadi program itu sudah berjalan sejak tahun 2000, UPTD ini kan terbentuk tahun 2017 jadi di 2018 itu kami sudah punya program nama program yang pertama itu mengutip sampah, kedua lubang viewpoint, ketiga rumah kompos , ke empat pembuatan eco break dma banyak lagi, jadi itu terus berjalan, kemudian di tahun 2020 itu terkena covid jadi beberapa anggaran itu di prioritaskan sebagai covid, jadi program program itu tidak berjalan lagi, tapi yang sampai saat ini berjalan itu paint sampah , paint sampah ini tidak dikami lagi mereka sudah pindah ke bidang sebelah namanya PKL, PKL ini kualitas lingkungan karena dia angkat sampah itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas lingkungan jadi mereka pengendali kualitas lingkungan, jadi mengutip sampah itulah salah satu program yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan, kalau untuk di TPA pengelolaan sampah kita hanya berdasarkan dari TPA kita ada disitu rumah kompos tapi tidak juga berjalan karena beberapa waktu yang lalu mesin kita itu dicuri jadi gabisa lagi berjalan, dulu kita itu punya mesin mesin nya itu peacak sampah jadi sampah organik itu di kumpulkan di cacak disana jadi kompos tapi sekarang gak ada lagi, kemudian sampai saat ini pengelolaan sampah itu hanya pengelolaan sampah di TPA dengan cara sistem pertholenfield itu aja dia untuk pengelolaan sampah .
3. Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada bapak hendra Menurut bapak Hendra selaku Anggota selaku anggota uptd bahwasannya Berarti kalau kendala atau tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan program program tersebut itu ada gak selain itu? "*Kalau untuk kendala itu banyak juga*

tantangan nya itu tadi anggaran mungkin kita saat ini masih kurang yang pertama ya, yang kedua untuk sdm nya juga kita kurang sdm yang mengerti tentang pengelolaan sampah itu di masyarakat terus yang ketiga untuk fasilitas juga kita ada di sediakan pemerintah tapi karena mungkin itu tadi taulah sekarang kayak mana kota binjai , jadi itu tadi kayak hilang gak nampak, jadi satu satunya cara yang sekarang ini dibuat ya itu tadi, program back sampah setiap hari rabu dan jumat”.

4. Menurut bapak Hendra selaku Anggota uptd dan Pak Hargianto masyarakat di sekitar di Dinas lingkungan hidup Kota Binjai dengan pertanyaan, Bagaimana upaya Kota Binjai dalam menghadapi hambatan dalam pengawasan penanggulangan yang dilakukan.

Menurut beliau, *upaya yang dapat dilakukan ialah agar kendala ataupun hambatan tersebut tidak berlanjut ialah lebih mengenalkan program-program yang Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai telah ciptakan melalui beberapa pendekatan seperti mengupdate pemberitahuan ataupun informasi terkini mengenai pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan. Serta terjun langsung ke lapangan sehingga masyarakat juga turut serta agar mengetahui kegiatan apa saja yang akan ataupun telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.*

Berarti kalau kendala atau tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan program program tersebut itu ada gak selain itu?

5. Menurut bapak Rukun S.Pd, MM selaku Ka uptd Ps
Kalau untuk kendala itu banyak juga tantangan nya itu tadi anggaran mungkin kita saat ini masih kurang yang pertama ya, yang kedua untuk sdm nya juga kita kurang sdm yang mengerti tentang pengelolaan sampah itu di masyarakat terus yang ketiga untuk fasilitas juga kita ada di sediakan pemerintah tapi karena mungkin itu tadi taulah sekarang kayak mana kota binjai , jadi itu tadi kayak hilang gak nampak, jadi satu satunya cara yang sekarang ini dibuat ya itu tadi, program back sampah setiap hari rabu dan jumat,

Apa rencana upt pengelolaan sampah ini untuk kedepannya untuk memastikan publik ini terus tercapai dan berkembang?

6. Menurut bapak Rukun S.Pd, MM selaku Ka uptd Ps
Kita kedepannya kita buat program terus tetap buat kita kalau di pemerintahan ini menyarenza rencana kerja nah itu kita tetap buat setiap tahunnya ap yang harus kita lakukan kita tetap buat rumah kompos, tetap buat ini segala macam itu tetap buat cuman mungkin saat ini itu belum menjadi prioritas gitu masih ada protes protes yang lain yang harus di selesaikan jadi itu belum ada di prioritas belum di prioritaskan menurut saya, tapi seadanya aja sekarang kami masih berjalan kok back sampah itu tetap berjalan

Kalau untuk permasalahan dalam melaksanakan program itu yang jadi permasalahannya ada di masyarakat itu sendiri?

7. Menurut bapak Rukun S.Pd, MM selaku Ka uptd Ps
Iya yang utama nya itu di masyarakat itu sendiri dulu ada namanya gerakan pilah sampah itu tahun 2019 kalau saya gak salah gerakan pilah sampah itu kita buat itu kita bagikan ke nbr yang tertutup jadi yang organik sama yang anorganik nanti anorganik nya itu dibuat disetor ke kelurahan di kelurahan itu dibuat back sampah kita berdaya ke masyarakat disitu terus lambat laun namanya juga sampah itukan kalau dia dibuat pas untung kalau enggak ya gak untung namanya sampah itukan emang kita gabisa makan dari situ kan kecuali yang kayak udang udang besar itu kan, kalau untuk yang kecil ini kan gabisa kita makan dari situ itukan hanya sebagai untuk sampingan jadi ya lama lama biar sampah nya tertutup juga, jadi program nya pun gak jalan juga terus dihambat, jadi dulu banyak program tapi dihambat covid ini semua nya hancur karena kan kita gak bisa tatap muka jadi kayak back sampah pun dulu kenak covid tutup rumah kompos tutup gaboleh kerumah rumah, warga warga pun takut kita datang kan, jadi sampai sekarang belum ada pembangunan lagi untuk program terus kami pun karena sudah terpecah kami hanya mengurus untuk kompos sedangkan back sampah sudah di urusi oleh bidang kualitas lingkungan. Point point dari pengelolaan sampah ini sumber daya disposisinya kurang bahwa kondisi ekonomi sosial politik itu memengaruhi kenapa kondisi ekonomi sosial politik kondisi ekonomi pegawai setiap orang kan beda beda ada yang janda anaknya 4 gtu istilahnya dia gak terpikir untuk kerja dulu gitu dia tapi dia mau set job lagi yang lain kan gitu itu kan berpengaruh terhadap peraturan peraturan yang dibuatkan seharusnya kan kita standby disini itulah dia Yang kedua disposisinya jadi disposisi itukan arahan arahan dari pimpinan jadi dari bapak ini hanya mendisposisikan apapun kesaya sayalah yang mendisposisikan ke mereka, jadi mereka itu disposisi itu kurang kesini itu dia yang menyebabkan kami itu program nya juga lambat gitu lambat karena disposisinya lambat terus sdm nya pun terbatas yang untuk mengerjakan mengerjakan ini jadi dia sudah ada bidangnya masing masing
Jadi kami itu bergerak berdasarkan undang undang dan peraturan juga, jadi uptd pengelolaan sampah ini bergerak berdasarkan peraturan walikota binjai nomor 26 tahun 2021 disitulah ada semua tentang pengelolaan sampah semua segala macam disitu ..
8. Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Hargianto di sekitar TPA di Dinas lingkungan hidup
“Saya sebagai anggota hanya dapat menjalankan pengangkutan bak sampah dengan mengelilingi rute rute yang telah ditetapkan . jadi , untuk perihal program yang di buat oleh dinas lingkungan hidup saya juga kurang paham saya hanya menjalankan sebagaimana pekerjaan saya”.
9. Bagaimana upaya Kota Binjai dalam menghadapi hambatan dalam pengawasan penanggulangan yang dilakukan ?
Menurut bapak Hendra selaku Anggota
Menurut beliau, *upaya yang dapat dilakukan ialah agar kendala ataupun hambatan tersebut tidak berlanjut ialah lebih mengenalkan program-program yang Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai telah ciptakan melalui beberapa pendekatan seperti mengupdate pemberitahuan ataupun informasi terkini mengenai pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan. Serta terjun langsung ke lapangan sehingga masyarakat juga turut serta agar mengetahui kegiatan apa saja yang akan ataupun telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.*

LAMPIRAN III

SK 1 PENDOMAN JUDUL SKRIPSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
 Unggul Cardis | Terpercaya
 Mengembangkan Kualitas Pendidikan
 Menoritas Unggul

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/DJ/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Baal No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://mip.umhu.ac.id | fisip@umhu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan,

Medan, 07 Februari 2024.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Dhimas Prayuda
 NPM : 2003100014
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 S.K.S diperoleh : 133,0 s.K.S, IP Kumulatif 3,58

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No	Judul yang diusulkan	Peretujuan
1	Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 tahun 2018 tentang tugas pokok dan Fungsi kepada UPTD Pengadaban Sampah di Kota Binjai.	7/2 2024 <i>dedi</i>
2	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.	
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2022 tentang Penanggulangan Pengemis dikota Binjai.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda okuit lunas beban SPP tahap berjaian;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Rekanan/ah/ik/Program Studi
 Ditandatangani oleh Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.




Medan, tanggal 07 Februari 2024.
 Ketua
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(.....)
 NIDN:

Pemohon,
 (.....) DHIMAS PRAYUDA
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(.....)
 NIDN: 010097201

(52) PB: DEDI AMRIZAL M.Si

LAMPIRAN VI

SURAT PERMOHONAN PENGANTIAN JUDUL SKRIPSI

Medan, 11 Mei 2024

Hal : Permohonan perubahan judul skripsi

Kepada Yth :
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DHIMAS PRAYUDA
Npm : 2003100014
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Bermohon kepada bapak ketua program studi ilmu administrasi publik untuk pengantian judul skripsi saya :

Judul awal :

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA PUTD PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINJAI**

Berganti menjadi :

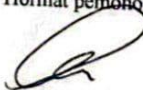
**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM
RANGKA MEMAKSIMALKAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD)
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINJAI**

Demikian permohonan ini dibuat, atas pertimbangan bapak saya ucapkan terimakasih
Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing


(DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.)

Hormat pemohon


(DHIMAS PRAYUDA)

Ketda Jurusan
Ilmu Administrasi Publik


(ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP.)

LAMPIRAN V

SK 2 SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 242/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 07 Februari 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DHIMAS PRAYUDA**
 N P M : 2003100014
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINJAI**

Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 052.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Februari 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 02 Sya'ban 1445 H
 12 Februari 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 0030017402



LAMPIRAN VI

SK 3 PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <http://fakp.umsu.ac.id> Email: tilsp@umsu.ac.id Instagram: @umsuMEDAN Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 26 Maret 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dhimas Prayuda
N P M : 2003100014
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 242/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024, tanggal 07 Februari 2024, dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Walikota bagai nomor 7 tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi kepala UPTD Pengelolaan Sampah di Kota bagai

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK - 2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan,
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mentertuui :
Pembimbing

(Dedi Anwar, S.Sos., M.Si.)

NIDN: 0110097201

Pemohon,

(Dhimas Prayuda)



LAMPIRAN VII

SK 4 UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 566/UND/II.3.AU/UMSU-03/FF/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : R. Lab. FISIP UMSU
Pemimpin Seminar* : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

SK.4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL- SKRIPSI
6	JUNIKA ROSSI	2003100056	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	STRATEGI KOORDINASI VERTIKAL KADER (PMT) DALAM PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN PROGRAM PENANGANAN STUNTING DI DESA SUKARAMAI KABUPATEN BATU BARA
7	OVY FEBRILA	2003100047	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG
8	HENDRA SYAHPUTRA SIREGAR	2003100033	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 12 RAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MEDAN
9	HARRY YUPRAWIDANA	2003100017	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK PARKIR DI KTA MEDAN
10	DHIMAS PRAYUDA	2003100014	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINJAI

Medan, 16 Ramadhan 1445 H
26 Maret 2024 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



LAMPIRAN VIII

SURAT KETENGAN IZIN PENELITIAN



Nomor : **1137/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024**
 Lampiran : **~**
 Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 24 Dzulhijjah 1445 H
 01 Juli 2024 M

Kepada Yth : Kepala Badan KESBANGPOL Kota Binjai

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **DHIMAS PRAYUDA**
 N P M : 2003100014
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINJAI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



LAMPIRAN IV

SURAT KETERANGAN BALASAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Jenderal Sudirman, No.6 Telepon 8821784 – 8821748
 BINJAI - 20714

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 000 . 0 . 1 - 4700

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan setelah membaca/ memperhatikan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 1137/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Izin Penelitian dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor 0009.2-1349/Bakesbangpol/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami berikan Izin Penelitian kepada :

Nama	: Dhimas Prayuda
NPM	: 2003100014
Alamat	: Jl. Ki. Yos Sudarso, LK.II, Kel.Jati Utomo
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Indonesia
Judul	: "Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah di Kota Binjai "
Peserta	: Sendiri
Tempat Penelitian	: Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
Lamanya	: 1 (Satu) Minggu
Penanggung Jawab	: Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan Penelitian, terlebih dahulu harus melapor dan berkonsultasi kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi di tempat Penelitian.
2. Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Binjai.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian.
4. Hasil lengkap Penelitian diserahkan kepada Bapperida Kota Binjai sebagai laporan berupa 2 (dua) rangkap dalam bentuk hard copy dan soft copy berupa PDF yang di kirim ke alamat email bidanlitbangbinjai@gmail.com selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah Penelitian selesai dilakukan.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Binjai apabila pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) Bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bersedia mematuhi
Ketentuan Butir 1 s.d 6

Dhimas Prayuda

Dikeluarkan di Binjai
pada tanggal Juli 2024

Sekretaris Daerah,
 Inwansyah Nasution

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Binjai (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN SEBOLGA NO. 5 BINJAI TELP. (061) 8004462
 FAK. 6004462 BINJAI - 20723

Binjai, 24.07.2024

Nomor : 000.9.1/4134 /DLH/ VII/ 2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Yth.:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Di -
 Medan

Sehubungan dengan surat Saudari, Nomor: 1137/ KET/ IL3.AU/ UMSU-03/ F/ 2024, tanggal 11 Juli 2024, perihal Rekomendasi Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima dan menyetujui Mahasiswa Saudari;

No	Nama	NPM	Judul Penelitian
1	Dhimas Prayuda	2003100014	"Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai"

Untuk melaksanakan Izin Penelitian selama 1 (Satu) minggu di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, sepanjang dapat mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada pada instansi kerja kami.

Demikian kami sampaikan, untuk maklum dan seperlunya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

AMAS MANSYUR SIREGAR, ST
PEMBINA TKI
NIP. 197601292006041005

LAMPIRAN X

SK 5 BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KPPT/10/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umsumed.ac.id> fkip@umsumed.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SK-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Dhimas Prayuda
 N P M : 2003100019
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota binjai nomor 7 tahun 2018 dalam rangka memaksimalkan hasil unit Pelaksana teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan sampah di binjai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1>	23/02/2024	ACC judul skripsi	
2>	18/03/2024	Bimbingan Proposal	
3>	20/03/2024	Revisian Bimbingan Proposal	
4>	16/03/2024	ACC Proposal	
5>	29/04/2024	Pengantaran judul skripsi	
6>	4/06/2024	Bimbingan draf wawancara	
7>	16/06/2024	ACC draf wawancara	
8>	23/08/2024	Bimbingan bab 4-5	
9>	5/09/2024	Bimbingan bab 4-5	
10>	12/09/2024	Bimbingan Bab 1-5	
11>	21/09/2024	ACC sidang meja hijau	

Medan, 27 September 2024.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)
 NIDN : 0030017402


(Aranda Mahardita, S.Sos., M.Si)
 NIDN :

(Reda Amriqal, S.Sos., M.Si)
 NIDN : 040097201



LAMPIRAN XI


SK 10 UNDANGAN / PNGGILAN UJIAN SKRIPSI




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
 Nomor : 1848/UND/II.3.AU/UMSU-09/F/2024


Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jumat, 18 Oktober 2024
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



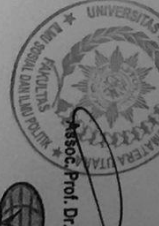
No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	DHIMAS PRAYUDA	2003100014	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPD) PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINJAI
2	HARRY YUPRAWIDANA	2003100017	NALL KHARIHAH, S.I.P, M.Pd	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA MEDAN
3	MUHAMMAD SOLEH RITONGA	2003100013	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	FUNGSI ACTUATING KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TANJUNG MEDAN KABUPATEN LABUHAN BATU
4	MALDINI SIREGAR	2003100007	NALL KHARIHAH, S.I.P, M.Pd	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN KELUAR SEKOLAH PADA SAAT JAM BELAJAR DI KOTA MEDAN
5	JUNIKA ROSSI	2003100058	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALL KHARIHAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN KELUAR SEKOLAH PADA SAAT JAM BELAJAR DI KOTA MEDAN

Menulis Sifatng. :
 1. Dittekan oleh :

 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.




Medan, 12 Rabul Akhir 1446 H
 15 Oktober 2024 M



Rektor
 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian
 Sekretaris
 Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

LAMPIRAN XII

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 02933/KET/II.9-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Dhimas Prayuda
 NPM : 2003100014
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 19 Rabiul Awal 1446 H
 23 September 2024 M

Kepala Perpustakaan,


 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

